KEMENTERIAN HUKUM
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
DIREKTORAT BADAN USAHA

Nomor SOP	:	AHU-80.OT.02.02
Tanggal Pembuatan	:	16 Desember 2024
Tanggal Revisi	:	
Tanggal Efektif		24 Februari 2025
Disahkan Oleh		Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Widodo
NAMA SOP	:	PEMBATALAN PRODUK HUKUM KORPORASI

DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :
1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang	1. Memahami ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai badan usaha/ korporasi 2. Memahami ketentuan pembatalan produk hukum korporasi 3. Menguasai tupoksi Direktorat Badan Hukum
2 Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang	
3 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan	
4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas	
5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan	
6 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	
7 Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum	
8 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas	
9 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengesahan Koperasi	
10 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Yayasan	
11 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan	
12 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata	
13 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Penggabungan dan Pemberitahuan Berakhirnya Status Badan Hukum Yayasan	
14 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2017 tentang Tata Cara Permohonan Perbaikan Data Badan Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan, dan Perkumpulan	
15 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Yayasan	

KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN :
1 SOP layanan badan hukum korporasi 2 SOP Persuratan	1. Komputer dan kelengkapannya 2. Data Badan Hukum Badan Usaha 3. Kumpulan Peraturan Perundang-undangan terkait 4. Jaringan internet
PERINGATAN :	**PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :**
Memperhatikan prinsip kehati-hatian serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBATALAN PRODUK HUKUM KORPORASI

No	Aktivitas/ Kegiatan	Pimpinan Tinggi (Menteri/ DirJen AHU/ Direktur BU)	Verifikator (Ketua Tim)	Konseptor (Anggota Tim)	Mutu Baku			Keterangan
					Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima Relaas pemberitahuan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan mendisposisikan untuk ditindaklanjuti				Relaas pemberitahuan putusan pengadilan	3 hari	Relaas, Lembar disposisi	
2	Melakukan telaah terhadap dokumen yang telah memperoleh disposisi Pimti. Menyiapkan konsep surat pemberitahuan kepada Para Pihak, dan/atau konsep surat pembatalan produk hukum.				Relaas, Lembar disposisi	10 hari	Konsep surat pemberitahuan kepada Para Pihak, dan/atau konsep surat pembatalan produk hukum	
3	Memeriksa hasil telaah, konsep surat pemberitahuan kepada Para Pihak, dan/atau konsep surat pembatalan produk hukum. Jika disetujui, disampaikan kepada Pimti. Jika tidak disetujui, dikembalikan untuk diperbaiki				Konsep surat pemberitahuan kepada Para Pihak, dan/atau konsep surat pembatalan produk hukum	1 hari	Konsep surat pemberitahuan kepada Para Pihak, dan/atau konsep surat pembatalan produk hukum	
4	Menandatangani Surat Pemberitahuan kepada Para Pihak dan/atau Surat Pembatalan produk hukum				Konsep surat pemberitahuan kepada Para Pihak, dan/atau konsep surat pembatalan produk hukum	3 hari	Surat pemberitahuan kepada Para Pihak, dan/atau konsep surat pembatalan produk hukum	
5	Mengirimkan Nota Dinas kepada Direktur TI untuk melakukan penghapusan data produk hukum dari pangkalan data				Nota Dinas	1 hari	Data produk hukum terhapus dari pangkalan data	
6	Menerima, mengarsipkan, dan mengirimkan Surat Pemberitahuan kepada Para Pihak dan/atau Surat Pembatalan produk hukum				Surat Pemberitahuan kepada Para Pihak dan/atau Surat Pembatalan produk hukum	1 hari	Surat Pemberitahuan kepada Para Pihak dan/atau Surat Pembatalan produk hukum	

